

---

## Kajian Hukum Terhadap Praktek Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur

---

Wahyuni Safitri<sup>1</sup>, Hardiansyah<sup>2</sup>

E-mail: wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia<sup>1</sup>

E-mail: hardyhardiansyah90@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia<sup>2</sup>

---

### Abstract

Efforts to implement family resilience in the province of East Kalimantan are based on 5 (five) dimensions of family resilience which refer to the Family Resilience Development Catalog Book from the Ministry of PPPA of the Republic of Indonesia. The five dimensions include the dimensions of the legality foundation and family integrity, the dimensions of physical resilience, the dimensions of economic resilience, the dimensions of socio-psychological resilience, the dimensions of socio-cultural resilience. Referring to these five dimensions, a legal review of the Practice of Family Resilience in East Kalimantan Province is needed so that it can be used as a reference in the making or drafting of regional regulations on the Implementation of Family Resilience in East Kalimantan Province, as a basis for strengthening family resilience by all stakeholders. whether in direct contact or indirectly based on the main duties, functions and authorities of each. This study aims to identify and examine the practice of family resilience in East Kalimantan Province and to identify and analyze problems faced by the people of East Kalimantan related to family resilience. This research is an Empirical legal research (Juridical Empirical). The results of this study indicate that the practice of organizing family resilience and the problems faced by the people of East Kalimantan related to family resilience can be seen from 2 (two) aspects, namely aspects of legality and family integrity and aspects of physical resilience. The aspects of legality and family integrity explain that the sociological condition of the people of East Kalimantan related to the implementation of family resilience in East Kalimantan Province actually still requires regulatory support from the local government, in this case the provincial government. This is illustrated by the data that has been included in the tables above, which we can illustrate with the divorce rate in East Kalimantan Province, the crime rate in East Kalimantan Province and the ownership of a birth certificate in East Kalimantan Province. The physical resilience aspect explains that the factual conditions of the people in East Kalimantan Province or the problems of the East Kalimantan community related to family resilience are described by food sufficiency and purchasing power of the people of East Kalimantan as indicators of welfare, expenditure on people's purchasing power for types of food which illustrates the average consumption pattern of a family. Home Ownership in East Kalimantan Province, and Workers and Unemployment in East Kalimantan Province.

**Keywords:** Administration; Resilience; Family


### Abstrak

Upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga di wilayah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada 5 (lima) dimensi ketahanan keluarga yang mengacu pada Buku Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga dari Kementerian PPPA Republik Indonesia. Kelima dimensi tersebut meliputi Dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, Dimensi Ketahanan Fisik, Dimensi Ketahanan Ekonomi, Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi, Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya. Mengacu pada kelima dimensi tersebut, maka diperlukan kajian hukum terhadap Praktek Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan atau penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai landasan penguatan ketahanan keluarga oleh seluruh stakeholders, baik yang bersentuhan langsung, maupun tidak langsung berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur terkait ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris (Yuridis Empiris). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kalimantan Timur terkait ketahanan keluarga dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yakni Aspek Legalitas dan Keutuhan Keluarga serta Aspek Ketahanan Fisik. Aspek Legalitas dan Keutuhan Keluarga menjelaskan bahwa kondisi sosiologis masyarakat Kalimantan Timur terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur sesungguhnya masih membutuhkan dorongan regulasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah

provinsi. Hal ini tergambar pada data-data yang telah dicantumkan dalam tabel-tabel diatas, yang dapat kita gambarkan dengan angka perceraian di Provinsi Kalimantan Timur, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur dan kepemilikan akte kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur. Aspek ketahanan Fisik menjelaskan bahwa kondisi faktual masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur atau permasalahan masyarakat kaltim terkait ketahanan keluarga yakni digambarkan dengan Kecukupan pangan dan daya beli masyarakat Kalimantan Timur sebagai indikator kesejahteraan, Pengeluaran untuk daya beli masyarakat terhadap jenis makanan yang menggambarkan pola konsumsi rata-rata sebuah keluarga. Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur, serta Pekerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur.

**Kata kunci:** Penyelenggaraan; Ketahanan; Keluarga

---

<b>DOI</b>	: <a href="https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.972">https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.972</a>
<b>Received</b>	: August 2020
<b>Accepted</b>	: August 2020
<b>Published</b>	: September 2020
<b>Copyright Notice</b>	: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <u><a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a></u> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

## 1. PENDAHULUAN

Keluarga sebagai unit terkecil dari suatu organisasi dalam masyarakat, memegang peran penting dalam membentuk karakter individu yang tangguh, memiliki kepedulian yang tinggi dan memiliki kepekaan sosial terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Melalui karakter yang baik, maka akan melahirkan suatu kondisi keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas merupakan ciri keluarga yang memiliki ketahanan yang baik, dan merupakan tahap awal untuk mencapai kesejahteraan keluarga dengan melindungi keluarga dan membantu keluarga untuk memajukan diri dan mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rumah tangga.

Pada tatanan sosial, kesejahteraan identik dengan istilah kesejahteraan sosial yang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial didefinisi kan sebagai “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri

dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.

Kedua definisi tersebut menunjukkan keluarga yang berkualitas dicirikan dengan kemampuan pencapaian kebutuhan material, spiritual, dan sosial yang menjadi dasar untuk dapat menjalani kehidupan pribadi dan bersosial guna menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki ketahanan untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Dalam pandangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia bahwa penguatan ketahanan keluarga merupakan salah satu langkah yang dianggap strategis, penting dan mendesak dalam membangun dan mensejahterakan keluarga.

Secara kekinian, pandangan Kementerian PPPA tersebut didasarkan pada kondisi yang dialami oleh keluarga Indonesia saat ini yang begitu memprihatinkan, terdapat berbagai persoalan dihadapi oleh keluarga Indonesia saat ini dan menunjukkan kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak, seperti perdagangan orang (*trafficking in person*), kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan kejahatan seksual, perundungan (*bullying*), dan berbagai persoalan lainnya yang berdampak pada psikologi dan secara fisik. Kondisi tersebut khususnya menimpa keluarga dengan kategori rentan terhadap berbagai permasalahan, terutama keluarga miskin dan kurang mampu.

Selain itu, ketahanan keluarga yang maksimal, bukan hanya melindungi individu keluarga secara internal tetapi juga dari pengaruh lingkungan, seperti jeratan narkoba. Data yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba masih relatif rendah, terutama di kalangan anak-anak dan remaja.

Berbagai permasalahan yang serupa dan hampir sama juga terjadi bagi sebagian keluarga di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Data BPS Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa:

- a. Proporsi penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut usia perkawinan pertama di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 usia kurang dari (<) 16 tahun berjumlah 8,49% dan sempat turun pada tahun 2015 menjadi 4,13%. Namun terjadi ironi pada tahun 2016 terjadi lonjakan menjadi 6,00% dan meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi 6,49%
- b. Pada tahun 2017 jumlah pengangguran terbuka dengan angka tertinggi dimiliki oleh lulusan Sekolah Menengah Atas sebesar 36.036 jiwa.

- c. Pada tahun 2017, jumlah perkara yang Diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten/Kota tertinggi adalah kasus Cerai Gugat yang berjumlah 4.470 kasus, disusul oleh kasus Cerai Talak yang berjumlah sebanyak 1.575 kasus. Sedangkan faktor penyebab tertinggi terjadinya perceraian pada tahun 2017 adalah meninggalkan salah satu pihak sebanyak 1.412 kasus atau meningkat dari tahun 2016 sebanyak 1.375 kasus. Kemudian disusul oleh KDRT pada tahun 2017 sebanyak 102 atau turun dari tahun sebelumnya sebanyak 116 kasus.
- d. Pada tahun 2017, jumlah kasus kriminal tertinggi yakni kasus narkoba pada angka 2.438 kasus atau meningkat dari tahun 2016 sebanyak 999 kasus. Kemudian disusul kasus pencurian pada angka 1.824 pada tahun 2017 atau turun dari tahun 2016 sebanyak 2.011 kasus.

Berbagai kasus di atas merupakan kasus yang terjadi akibat lemahnya ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, hingga tahun 2017 jumlah keluarga Pra Sejahtera berjumlah 60.151 jiwa atau meningkat dari tahun 2016 yang berjumlah 54.159 jiwa, yang juga meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah 52.006 jiwa. Pada tahun 2017 tersebut, angka tertinggi keluarga Pra Sejahtera berada di Kota Samarinda yang berjumlah 16.021 jiwa disusul Kota Balikpapan sebesar 11.914 jiwa dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 12.812 jiwa.

Dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Perda No. 2 Tahun 2019) dijelaskan bahwa pada umumnya, Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir, akan tetapi pada aspek kesejahteraan masyarakat Kaltim masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat, Kaltim memiliki tingkat literasi masyarakat yang sangat baik dengan angka melek huruf di atas rata-rata nasional. Selama lima tahun terakhir, capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi telah naik sebesar 0,64 poin, selain itu untuk melihat keterjangkauan layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah adalah Rata-Rata Lama Sekolah yang mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Selain pendidikan, kesehatan juga menjadi indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat, perkembangan usia harapan hidup provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan secara perlahan. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan masyarakat dapat dilihat melalui jumlah

kepesertaan jaminan kesehatan baik melalui jamkesda (untuk penduduk miskin) dan BPJS berbayar di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan kondisi yang dialami dan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur, maka ditetapkan bahwa visi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat”, dalam kaitannya dengan pembangunan ketahanan keluarga dapat ditemui dalam penjelasan mengenai “Berani” adalah Pemerintah mempunyai keberanian, tekad, dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat. visi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk misi Provinsi Kalimantan Timur yang berupa “berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulai dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas” yang didalam penjelasannya termasuk mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia untuk membentuk identitas dan karakter manusia yang berkualitas.

Selanjutnya dalam arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023 pada tujuan mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing, yang mana sasaran untuk mencapai hal tersebut dirumuskan sebagai berikut, meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat, meningkatnya taraf pendidikan masyarakat, meningkatnya gizi dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, merujuk pada pemaparan tersebut, dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen untuk meningkatkan dan membangun ketahanan keluarga, yang dimulai dari sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berdaya saing.

Upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berdasarkan pada 5 (lima) dimensi ketahanan keluarga yang mengacu pada Buku Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga dari Kementerian PPPA Republik Indonesia. Kelima dimensi tersebut meliputi:

- a. Dimensi Landasan Legalitas dan keutuhan Keluarga
- b. Dimensi Ketahanan Fisik
- c. Dimensi Ketahanan Ekonomi
- d. Dimensi Ketahanan Sosial-Psikologi
- e. Dimensi Ketahanan Sosial-Budaya

Mengacu pada kelima dimensi tersebut, maka diperlukan kajian hukum terhadap Praktek Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan atau penyusunan rancangan peraturan

daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai landasan penguatan ketahanan keluarga oleh seluruh stakeholders, baik yang bersentuhan langsung, maupun tidak langsung berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan mengkaji praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur dan Mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Timur terkait ketahanan keluarga.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum Empiris (Yuridis Empiris), dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, dan lain-lain sebagai sumber datanya dan untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

Sumber Data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas (Soerjono Soekamto, 2007). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara. Selanjutnya Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Kemudian Bahan Hukum Sekunder yakni terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, jurnal, hasil penelitian dari karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan Bahan Hukum Tersier yakni terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Metode dan pengumpulan data yang digunakan yakni dengan cara wawancara (interview) yaitu proses untuk mendapat keterangan untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber tentang permasalahan dalam penelitian ini (Muh. Nasir, 2010). Penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini didasari pertimbangan, melalui wawancara dengan pihak pemerintah provinsi dalam hal ini melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur dan Polda Kaltim. Kemudian

melakukan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan mengolah bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini

### **3. PEMBAHASAN**

Ketahanan keluarga pada prinsipnya bukan tanggungjawab pribadi-pribadi semata, lebih dari itu ketahanan keluarga merupakan tanggungjawab pemerintah dalam rangka mewujudkan sebuah ketahanan keluarga. Pergaulan yang modern dan terbuka saat ini memberikan gambaran yang heterogen bagi keluarga. Kehidupan masyarakat lebih berwarna dalam menjalani kehidupannya, baik individu maupun keluarga. Kehidupan yang modern juga memberikan tantangan yang berbeda. Masyarakat saat ini menghadapi kehidupan yang sarat dengan perbedaan, teknologi, keterbukaan bahkan kehidupan orang lain dapat terlihat dengan mudah. Akses masyarakat melalui teknologi yang begitu mudah dapat memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat dan juga individu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks globalisasi, berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu dan masyarakat. Eksistensi individu dan keluarga telah menghadapi berbagai ancaman yang bersumber dari berbagai dampak proses transformasi sosial yang berlangsung sangat cepat dan tak terhindarkan. Banyak keluarga mengalami perubahan, baik struktur, fungsi, dan perannya. Dampak negatif transformasi sosial akan menggoyahkan eksistensi individu dan keluarga sehingga menjadi rentan atau bahkan berpotensi tidak memiliki ketahanan. Oleh karena itu, individu dan keluarga perlu ditingkatkan ketahanannya melalui upaya pemberdayaan, terutama yang berkaitan dengan penguatan struktur, fungsi, dan peran keluarga dalam masyarakat.

Kehidupan dengan tata nilai sosial yang berbeda saat ini menjadi kian terbuka. Tidak sulit bagi masyarakat saat ini untuk bisa meniru budaya lain, tren budaya lain atau bahkan meniru berbagai tindakan yang dilarang atau tidak etis. Hal ini memerlukan filter pada sistem kehidupannya. Sistem ini berupa konsep atas sebuah penerimaan nilai-nilai perikehidupan. Nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan atas perikehidupan setiap manusia. Kehidupan beragama menjadi fondasi pada tiap individu dan keluarga. Dalam rangka menggambarkan

praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga serta menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kalimantan timur maka penelitian menggunakan metode observasi dan wawancara di lapangan. Data yang diperoleh oleh tim peneliti akan menggambarkan permasalahan terkait dengan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur. Berikut data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilihat dari 2 (dua) aspek, yakni sebagai berikut :

### **1. Aspek Legalitas dan Keutuhan keluarga**

Aspek legalitas merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan sebuah konsep keluarga yang bukan hanya untuk bertahan hidup tetapi juga mengembangkan kehidupan yang berkualitas dan manusiawi di lingkungan masyarakat.

Tabel 1. Angka Perceraian di Provinsi Kalimantan Timur

NO	STATUS PERKAWINAN	2017	2018	2019
1	Kawin	1.643.516	1.683.819	1.706.288
2	Cerai Hidup	43.348	47.993	51.161
3	Cerai Mati	92.063	100.044	103.118
	JUMLAH	1.778.927	1.831.856	1.860.567

Sumber: [dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/](http://dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/)

Secara awam angka perceraian (hidup) kalimantan timur berada pada angka 7,7 %. Hal ini menjadi salah satu hal yang harus dicermati dalam sebuah bingkai ketahanan keluarga karena perceraian memiliki dampak yang tidak mudah bagi sebuah keluarga terutama menyangkut anak-anak. Perceraian dapat menjadi pemicu sebuah kerusakan-kerusakan berikutnya seperti terjadinya suatu kriminalitas. Kriminalitas banyak terjadi dalam sebuah keluarga karena dilatarbelakangi oleh kehidupan keluarga yang tidak sehat. Ada sebuah proses panjang yang dibutuhkan oleh keluarga untuk membentuk pribadi-pribadi dalam keluarga tersebut menjadi pribadi yang tidak melawan hukum dan jauh dari hal-hal yang mengarah pada tindakan kriminal.

Keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas. Kapasitas keluarga mempunyai keberfungsian dan keberlangsungan masyarakat. Banyak masalah sosial yang terjadi berawal dari kegagalan/ketidakberfungsian keluarga sehingga menimbulkan berbagai implikasi sosial, ekonomi, dsbnya. Contoh: tawuran, kekerasan terhadap anak, seks bebas dan penyalahgunaan NAPZA di kalangan remaja, dll.



Tabel 2. Angka Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur

NO	TAHUN	ANGKA
1	2016	9.780
2	2017	8.551
3	2018	6.715
	JUMLAH	25.046

Sumber. POLDA Kalimantan Timur

Demikian halnya menyangkut status anak adalah hal penting dimata hukum. Satus anak digambarkan pada akta keluarga. Dalam konteks ketahanan keluarga status anak menjadi hal yang harus dibahas karena banyak hal yang berada dibalik sebuah “akta kelahiran”. Status anak pada akte bukan hanya mencerminkan tentang relasi hubungan keluarga tetapi juga hubungan sosial serta kondisi ketahanan sebuah keluarga itu dilihat. Misalnya akta dengan hanya nama ibu menerminkan adanya ketidakberasan pada status pernikahan.

Demikian juga kepengurusan akta akan dapat melindungi bukan hanya hak-hak keperdataan seseorang tetapi juga hak-hak sosial sebagai warga negara, misalnya jaminan kesehatan, jaminan sosial dan lain sebagainya. Namun tidak semua orang menganggap penting makna dari sebuah akta kelahiran sehingga pada daerah tertentu masih banyak anak yang hanya punya catatan lahir bukan akta kelahiran. Berikut digambarkan kepemilikan akta di Kalimantan Timur, nampak pada angka statistik di bawah ini angka kepemilikan menunjukkan bahwa masih banyak orang yang tidak memiliki akta kelahiran yang berarti masih sedikit orang yang melakukan kepengurusan akta kelahiran. Angka tidak punya akta kelahiran masih lebih tinggi dibandingkan angka yang punya akta lahir.

Tabel 3. Kepemilikan Akte Kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur

NO	KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN	2017	2018	2019
1	Punya	1.358.562	1.594.344	1.688.382
2	Tidak Punya	2.146.599	1.957.847	1.923.724
	JUMLAH	3.505.161	3.552.191	3.612.106

Sumber. [dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/](http://dkp3a.kaltimprov.go.id/e-infoduk/)

## 2. Aspek Ketahanan fisik

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Tentunya hal ini menyangkut ketahanan fisik sebagai salah satu aspeknya. Ketahanan fisik berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar sistem keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Berikut beberapa hal kondisi faktual masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa indikator diantaranya :

- A. Kecukupan pangan dan daya beli masyarakat Kalimantan Timur sebagai indikator kesejahteraan. Hal ini tergambar pada angka rata-rata pengeluaran perkapita.

Tabel 4.

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Untuk Makanan  
menurut Jenis Sub Kelompok Makanan di Kalimantan Timur  
Tahun 2016-2017

NO	JENIS KELOMPOK MAKANAN	2016	2017
1	Padi-padian	65365	64197
2	Umbi-umbian	5181	5507
3	Ikan/Undang/Cumi	57951	74143
4	Daging	29574	34089
5	Telur dan susu	43027	42380
6	Sayur-sayuran	42814	57153
7	Kacang-kacangan	11328	13519
8	Buah-buahan	26768	27424
9	Konsumsi lainnya	57581	65664
10	Makanan jadi	172069	205780
11	Rokok	77260	73678
	JUMLAH	587920	663535

Sumber. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Saat ini dapat kita lihat bahwa konsumsi pembelian paling tinggi adalah untuk makanan jadi. Sedangkan paling rendah adalah pembelian umbi-umbian. Pembelian daging dan susu masih lebih rendah dari pembelian rokok.

- B. Pengeluaran untuk daya beli (pengeluaran) masyarakat terhadap jenis makanan menggambarkan pola konsumsi rata-rata sebuah keluarga.

Tabel 5.

Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita masyarakat Katim  
Sebulan untuk Makanan dan Bukan makanan menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	MAKANAN	BUKAN MAKANAN
1	Paser	55,22	44,78
2	Kutai Barat	55,72	44,28
3	Kutai Kartanegara	49,79	50,21
4	Kutai Timur	51,44	48,56
5	Berau	48,05	51,95
6	Penajam Paser Utara	49,22	50,78
7	Mahakam Ulu	53,24	46,76
8	Balikpapan	41,81	58,19
9	Samarinda	41,71	58,29
10	Bontang	42,54	57,46

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat di Kalimantan Timur masih harus didorong dalam standarisasi kesehatan yang lebih tinggi. Karena pola konsumsi ini berhubungan dengan ketahanan keluarga karena menyangkut ketahanan fisik. Makanan yang dimasak oleh anggota keluarga tentunya makanan yang dipilih untuk memenuhi gizi sekaligus selera keluarga. Makanan jadi mempengaruhi pola konsumtif masyarakat yang cenderung instan. Disinilah terkadang pola konsumsi sangat mempengaruhi kesehatan keluarga atau ketahanan fisik keluarga. Kendati demikian Katahanan fisik bukan hanya menyangkut apa yang dikonsumsi tetapi juga menyangkut proses konsumsi tersebut.

- C. Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur

Rumah adalah faktor yang sangat signifikan dala ketahanan kelaurga. Keluarga akan dapat lebih tenang, bebas dalam mengambil keputusan. Jika sebuah keluarga sudah memiliki rumah maka dia akan dapat lebih punya kesempatan untuk

mengembangkan kualitas keluarganya tidak terbebani lagi dengan biaya sewa yang tinggi setiap tahunnya. Keberadaan rumah secara permanent mempengaruhi keluarga terkait dengan interaksi keluarga. Hubungan aksi reaksi dan komunikasi antar anggota keluarga yaitu antar pasangan suami istri, antar orang tua dengan anak, antar anak dan antar anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Berikut gambaran statistik Presentase Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 6.

Kepemilikan Rumah di Kalimantan Timur

TAHUN	MILIK SENDIRI	KONTRAK/ SEWA	BEBAS SEWA	DINAS/ LAINNYA	JUMLAH
2016	71,12	17,86	8,02	3,00	100,00
2017	68,87	18,45	9,21	3,47	100,00
2018	70,31	17,90	9,67	2,12	100,00

Sumber. BPS Provinsi Kalimantan Timur

D. Pekerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 7.

Angka Pengangguran dan Pekerja di Kalimantan Timur

TAHUN	BEKERJA	PENGANGGURAN	JUMLAH
2016	1581239	136653	1717892
2017	1540675	114289	1654964
2018	1618285	114313	1732598

Sumber. BPS Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari hasil penelitian sebagaimana telah dicantumkan dalam tabel-tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kalimantan timur terkait ketahanan keluarga dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yakni Aspek Legalitas dan Keutuhan Kelurga serta Aspek Ketahanan Fisik.

Aspek Legalitas dan Keutuhan Keluarga menjelaskan bahwa kondisi sosiologis masyarakat Kalimantan Timur terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur sesungguhnya masih membutuhkan dorongan regulasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. Hal ini tergambar pada data-data yang sudah dicantumkan dalam tabel-tabel diatas, yang dapat kita gambarkan sebagai berikut:

Aspek legalitas dan keutuhan keluarga digambarkan dengan angka perceraian akibat

cerai hidup sebesar 7,7% merupakan hal yang harus dicermati sebagai gejala sosial di masyarakat. Cerai hidup mengalami peningkatan di tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Perceraian merupakan gambaran dari sebuah ketidakutuhan keluarga yang tentunya berpotensi memberikan dampak pada ketahanan keluarga. Banyak tindak kejahatan atau kehidupan yang menyimpang berawal dari perceraian. Dimana seseorang atau anggota keluarga tidak tahan dengan berbagai kondisi akibat perceraian.

Hal ini jelas terlihat bahwa angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami kenaikan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan catatan dari POLDA Kalimantan Timur. Angka kriminalitas pada anak-anak yang meningkat membutuhkan sebuah sistem ketahanan keluarga untuk mengantisipasinya. Kriminalitas dapat terjadi karena berbagai hal dan bukan hanya terjadi pada orang dewasa saja tetapi saat ini kriminalitas juga dilakukan oleh anak-anak. Kejadian kriminal yang menimpa anggota keluarga entah pada posisi korban atau mungkin sebagai pelaku tentu membutuhkan sebuah sistem untuk meminimalisir dampak atau bahkan menyelesaikannya. Sistem inilah yang disebut ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga merupakan instrumen untuk mengantisipasi kriminalitas dalam keluarga.

Ketahanan keluarga merupakan konsep untuk dapat berfikir setara dalam menempatkan anggota keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Konsep kesetaraan gender yang ada pada ketahanan keluarga akan memberikan gambaran peran ayah dan ibu dalam menjalankan kehidupan berkeluarga sekaligus juga sebagai instrument untuk bisa saling menghargai antar anggota keluarga. Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Sementara suatu keluarga akan memiliki ketahanan dan kemandirian yang tinggi apabila keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, ketahanan keluarga diindikasikan sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumberdaya setidaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk didalamnya adalah kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat, dan integrasi sosial.

Dengan demikian, ketahanan keluarga merupakan konsep yang mengandung aspek multidimensi. Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan keluarga maka dinamika kehidupan sosial keluarga sebagai salah satu aspek kesejahteraan keluarga juga dapat diukur. Kondisi ketahanan keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial yang sedang berlangsung. Sayangnya, meskipun konsep ketahanan keluarga telah dicantumkan secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi sejauh ini dirasakan masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan berlaku umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia.

Kalimantan timur berada kondisi sosiologis, ekonomi, budaya dan masyarakat yang beragam, modern dan juga berada pada kondisi ekonomi yang baik. Dikaitkan dengan ketahanan keluarga sesungguhnya Kalimantan Timur harus dilihat dari berbagai indikator. Katahanan keluarga memiliki banyak indikator yang terdiri dari : Ketahanan Fisik, Ketahanan ekonomi, Ketahanan sosial budaya, Ketahanan Sosial Psikologi, Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga.

Pada pembahasan sebelumnya Aspek Ketahanan Fisik di Provinsi Kalimantan timur dapat dilihat dari berbagai fenomena kepemilikan hunian dan lain sebagainya. Pada dimensi ketahanan fisik masyarakat Kalimantan Timur berada pada posisi yang tidak mengkhawatirkan. Pada pembahasan sebelumnya tergambar bahwa terkait dengan rumah tinggal masyarakat Kalimantan Timur berada pada tempat tinggal yang cukup representatif meskipun terkait dengan kepemilikan masih ada yang belum memiliki rumah sendiri. Pada rata-rata rumah tangga, suami istri juga memiliki kamar yang terpisah dari anak-anak dan anggota keluarga lain.

Pada pembahasan sebelumnya kita dapat melihat bahwa beberapa daerah Kalimantan Timur memiliki tingkat konsumtif yang tinggi, namun juga memiliki sisi-sisi yang mengkhawatirkan diantaranya mencakup angka kriminalitas serta konsumtif yang tinggi. Pada sudut pandang sosial budaya ketahanan sosial dan budaya masyarakat Kalimantan Timur memiliki nilai yang tinggi dalam bergotong royong dan dalam partisipasi aktifitas sosial. Hal ini menjadi modal bahwa masyarakat Kalimantan Timur memiliki nilai-nilai ketahanan keluarga khususnya terkait dengan kerjasama antar individu dan keluarga dalam situasi atau kondidi sosial tertentu. Alasan bahwa sisi ekonomi akan mempengaruhi keluarga

memang benar. Bahwa ekonomi bukan hanya menyangkut akan pemenuhan kebutuhan fisik tetapi juga pemenuhan kebutuhan dalam rangka peningkatan SDM.

Pada sisi ekonomi, masyarakat Kalimantan Timur juga digolongkan mampu untuk membiayai anak untuk mengenyam pendidikan hingga level, universitas. Sehingga, dengan kata lain keluarga yang tidak ada anak yang putus sekolah berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Selain tidak ada anak yang putus sekolah, keluarga yang mempunyai ketahanan ekonomi yang baik juga harus dapat menjamin anggota keluarganya untuk memperoleh pendidikan sehingga tidak ada anak yang tidak pernah sekolah.

#### **4. KESIMPULAN**

Praktek penyelenggaraan ketahanan keluarga serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kalimantan timur terkait ketahanan keluarga dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yakni Aspek Legalitas dan Keutuhan Kelurga serta Aspek Ketahanan Fisik. Aspek Legalitas dan Keutuhan Keluarga menjelaskan bahwa kondisi sosiologis masyarakat Kalimantan Timur terkait penyelenggaraan ketahanan keluarga di Provinsi Kalimantan Timur sesungguhnya masih membutuhkan dorongan regulasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi. Hal ini tergambar pada data-data yang telah dicantumkan dalam tabel-tabel diatas, yang dapat kita gambarkan dengan angka perceraian di Provinsi Kalimantan Timur, angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Timur dan kepemilikan akte kelahiran di Provinsi Kalimantan Timur. Aspek ketahanan Fisik menjelaskan bahwa kondisi faktual masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur atau permasalahan masyarakat kaltim terkait ketahanan keluarga yakni digambarkan dengan Kecukupan pangan dan daya beli masyarakat Kalimantan Timur sebagai indikator kesejahteraan, Pengeluaran untuk daya beli masyarakat terhadap jenis makanan yang menggambarkan pola konsumsi rata-rata sebuah keluarga. Kepemilikan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur, serta Pekerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur.

#### **5. REFERENSI**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Irmayani S. 2007. Membangun Keluarga Berketahanan Sosial Dalam Era Modernisasi. Magister Psikologi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Katalog Pembangunan Ketahanan Keluarga Indonesia 2016. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.

- Kartiyem. 2014. Hubungan Strategi Koping Dan Kesejahteraan Keluarga Nelayan. Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Muh. Nasir, 2010, Metode Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Puspitawati, Herien. 2013. Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga. Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor.
- Rusydi, Lina Najwatur. 2011. Analisis Perbandingan Manajemen Sumberdaya Dan Kesejahteraan Keluarga Pada Keluarga Miskin Dan Tidak Miskin. Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Sunarti E. 2001. Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Kualitas Kehamilan. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press. Jakarta, 2007.